









mengemukakan, apa yang dikatakan benar itu juga ikut mempengaruhi. Seorang mahasiswa, aktivis, masyarakat biasa atau seorang dosen jika dihadapkan pada objek yang sama belum tentu menghasilkan kesimpulan yang sama pula terhadap objek tersebut, apalagi masing masing orang tersebut memang punya kepentingan atas status dirinya.

Dalam komunikasi, kebenaran merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Faktualitas menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan dilakukan secara jujur, tidak memutar balikkan fakta yang ada. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau dapat diakui integritas dan kredibilitasnya.

Begitupun dengan seorang Muslim dalam keadaan apapun akan selalu berkata yang benar, baik dalam menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan, melarang dan memerintah ataupun lainnya. Orang yang selalu berkata benar akan dikasihi Allah dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya orang yang berdusta apalagi suka berdusta, masyarakat tidak akan mempercayainya. Pribahasa mengatakan, "Sekali lacung keujian seumur hidup orang tidak akan percaya". Kalau sudah demikian sulit bagi dia untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Ucapan manusia adalah ekspresi yang ada di hatinya. Hati yang baik melahirkan ucapan yang baik. Sebaliknya hati yang buruk mengeluarkan ucapan yang buruk. Perbaikan ucapan harus dimulai dari perbaikan hati. Apabila hati baik, ucapan yang keluar menjadi baik dan selanjutnya akan mengikuti oleh perilaku yang baik. Dan perilaku yang baik akan dibalas dengan ampunan dosa yang dapat membersihkan diri manusia.

Kesesuaian antara ucapan dengan hati nurani dan kenyataan yang diucapkan secara terpadu. Kesesuaian ketiga komponen tersebut melahirkan shidiq yang sempurna. Apabila kurang salah satunya, maka belum dikatakan shidiq yang sempurna, bahkan tidak dikatakan shidiq, atau pada orang yang mengucapkan itu ada sifat shidiq dan ada sifat kazib (dusta).

Ini menuntut wartawan jujur kepada khalayak, sebab mereka adalah penyaji kebenaran. Untuk mendekati kebenaran, jurnalisisme bisa menggunakan banyak metode dan sumber. Untuk mewujudkannya Kovach dan Rosenstiel mengajukan beberapa pertanyaannya: Bagaimana anda tahu apa yang anda tahu?; Siapa sumber – sumber anda?; Seberapa langsung pengetahuan anda?; Bias macam apa yang mungkin mereka miliki?; Apakah ada kesaksian – kesaksian yang berlawanan?; Apa yang kita tidak ketahui?







lembaga selama konferensi. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang diperdebatkan. Dalam hal ini kredibilitas akan merujuk kepada nama baik dan reputasi dan juga sepak terjang seseorang didalam profesi yang digelutinya selama ini, yang mana hal tersebut akan digunakan sebagai tolak ukur atas kemampuannya orang tersebut dalam menjalankan profesi yang digelutinya.

Yang membedakan antara jurnalisme dengan hiburan (*entertainment*), propaganda, fiksi, atau seni, adalah disiplin verifikasi. Hiburan –dan saudara sepupunya “infotainment”—berfokus pada apa yang paling bisa memancing perhatian. Propaganda akan menyeleksi fakta atau merekayasa fakta, demi tujuan sebenarnya, yaitu persuasi dan manipulasi. Sedangkan jurnalisme berfokus utama pada apa yang terjadi, seperti apa adanya. Jurnalisme adalah sebuah disiplin yang berurusan dengan proses pencarian kebenaran (*truth*). Karena dhoif (lemah), tak ada manusia yang dapat meraih kebenaran absolut. Itu sebabnya, yang bisa di lakuakn waratawan hanyalah berupaya mendekati kebenaran. Maka verifikasi mutlak dilakukan.

Verifikasi dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya saksi, sumber, atau pihak lain yang memberikan informasi tambahan seputar pemberitaan tersebut. Dalam sebuah pemberitaan yang obyektif adalah metodenya, bukan wartawannya. Mencari

sebuah saksi, menyikapi sebanyak mungkin sumber, atau bertanya berbagai pihak untuk komentar, semua mengisyaratkan adanya standar yang professional, berikut penjelasannya: Pertama, saksi adalah orang yang melihat kejadian secara langsung. Kedua sumber berkaitan dengan narasumber yang memiliki keterkaitan. Dan Ketiga Pihak lain adalah orang lain yang tidak terlibat langsung dalam kejadian ini namun memberikan informasi tambahan.

Kovach dan Rosentiel mengemukakan konsep verifikasi antara lain:

- a) Jangan menambah – namabahi berita atau mengarang informasi apapun. Ini juga meliputi jangan mengatur ulang kejadian dalam satu waktu, satu tempat, gabungan karakter, atau gabungan peristiwa. Wartawan surat kabar menulis kronologis suatu kejadian berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Jadi bukan karangan atau skenario dari wartawan. Sebuah peristiwa diceritakan kembali oleh wartawan berdasarkan urutan kejadiannya. Supaya lebih faktual, biasanya dilengkapi dengan tanggal atau waktu kejadian.
- b) Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa maupun pendengar. Jika wartawan menghilangkan sesuatu yang perlu di ketahui pembaca maka itu di sebut menipu.

Jurnalisme harus berpegang teguh pada kejujuran. Prinsip ini terkait erat dengan prinsip jangan menambahi. Kedua prinsip tersebut berlaku sebagai garis panduan dasar bagi wartawan untuk memberi batas antara fakta dan fiksi.

- c) Bersikaplah setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi dalam melakukan reportase. Jika wartawan adalah pencari kebenaran, hal ini harus diikuti dengan mereka berlaku jujur kepada audiens. Wartawan bertanggung jawab sebagai penyaji kebenaran, maka dari itu, sebisa mungkin bersikap terbuka dan jujur kepada audiens tentang apa yang mereka tahu dan apa yang mereka tidak tahu. Jurnalis memberitakan apa yang mereka ketahui, jika tidak tahu, ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu. Konsep ini juga berkaitan dengan konsep sebelumnya.
- d) Lebih mengandalkan pada liputan orisinal yang dilakukan sendiri. Orisinalitas sangat penting dalam sebuah pemberitaan. Orisinalitas adalah nilai yang tertanam kuat dalam jurnalisme. Daripada mempublikasikan laporan dari media lain, para wartawan condong untuk mengharuskan salah satu reporter mereka untuk menelepon sumber untuk mengkonfirmasi lebih dulu. Bersikap rendah hati, tidak menganggap diri paling tahu.







dihadiri oleh beragam wartawan, diantaranya adalah tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan dan pejuang.

Pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan, diantaranya adalah: Pertama, disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diketuai Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo. Dan Kedua, disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan diantaranya: Sjamsuddin Sutan Makmur (harian Rakjat, Jakarta), B.M. Diah (Merdeka, Jakarta), Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta), Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto), Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya), Bambang Suprpto (Penghela Rakjat, Magelang), Sudjono (Berdjuang, Malang), dan Suprijo Djojopadmo (Kedaulatan Rakjat, Yogyakarta).

Kelahiran PWI di tengah kancah perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan, melambangkan kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia dalam tekad dan semangat patriotiknya untuk membela kedaulatan, kehormatan serta integritas bangsa dan negara. Bahkan dengan kelahiran PWI, wartawan Indonesia menjadi semakin teguh dalam menampilkan dirinya sebagai ujung tombak perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme dan dalam menggagalkan negara-negara mereka yang hendak meruntuhkan Republik Indonesia.

Sejarah lahirnya surat kabar dan pers itu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya idealisme perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. Di zaman revolusi fisik, lebih terasa lagi betapa pentingnya peranan dan eksistensi pers sebagai alat perjuangan, sehingga kemudian berkumpul di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1946 tokoh-tokoh surat kabar, tokoh-tokoh pers nasional, untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idil dan komersialnya, mengingat saat itu pers penjajah dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya.

Sebenarnya SPS telah lahir jauh sebelum tanggal 6 Juni 1946, yaitu tepatnya empat bulan sebelumnya bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946. Karena peristiwa itulah orang mengibaratkan kelahiran PWI dan SPS sebagai “kembar siam”. Di balai pertemuan “Sono Suko” di Surakarta pada tanggal 9-10 Februari, jurnalis dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Yang datang beragam jurnalis, yaitu tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, jurnalis pejuang dan pejuang jurnalis.

Melalui organisasi tersebut mereka bertekad melanjutkan perjuangan mewujudkan Negara kesatuan republik Indonesia yang kuat, dimana rakyatnya bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa serta hidup didalam keadilan dan kemakmuran di tengah tengah lingkungan pergaulan









## 2) Sebagai Pelurus Informasi (Musaddid).

Setidaknya ada tiga hal yang harus diluruskan oleh para jurnalis Muslim. *Pertama*, Informasi tentang ajaran dan umat Islam. *Kedua*, Informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam. *Tiga*, Dituntut mampu menggali --melakukan *investigative reporting*-- tentang kondisi umat Islam di berbagai penjuru dunia. Peran Musaddid terasa relevansi dan urgensinya mengingat informasi tentang Islam dan umatnya yang datang dari pers Barat biasanya *biased* (menyimpang, berat sebelah) dan distorsif, manipulatif, alias penuh rekayasa untuk memojokkan Islam yang tidak disukainya. Di sini, jurnalis Muslim dituntut berusaha mengikis fobi Islam (Islamophobia) yang merupakan produk propaganda pers Barat yang anti-Islam.

## 3) Sebagai Pembaharu (Mujaddid)

Yakni penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam (reformisme Islam). Jurnalis Muslim hendaknya menjadi “jurubicara” para pembaharu, yang menyerukan umat Islam memegang teguh al-Quran dan as-Sunnah, memurnikan pemahaman tentang Islam dan pengamalannya (membersihkannya dari bid’ah, khurafat, tahayul, dan isme-isme asing non-Islami), dan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan umat.











































		(Studi Presepsi Pekerja Koran Madura Sumenep Tentang Kode Etik Jurnalistik)	media berupa Koran	pengaruh, sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif dalam menjabarkan fenomena di internal Koran
3.	Shinta Bela Dewanti, 2014	Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan Wartawan Harian Joglosemar)	Memiliki persamaan bagaimana menerapkan Kode Etik Jurnalistik	Pada penelitian terdahulu Kode Etik yang digunakan semua kode etik Jurnalistik akan tetapi pada peneliti saat ini focus hanya pasal 11 Kode Etik Jurnalistiknya dan objeknya pun berbeda.



4.	Surya Fajar 2011	Implementasi Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Harian Umum Bandung Ekspres.	pada penelitian kali ini sama – sama meneliti tentang penerapan kode etik jurnalistik dan media yang di pakai juga sama yakni Koran	Perbedaan pada peneliti terdahulu terletak pada pasal kode etik jurnalistiknya yang mana peneliti terdahulu meneliti tentang pasal 1 dan peneliti pada saat ini meneliti kode etik jurnalistik pasal 11 dan kinerja jurnalis muslim Koran duta masyarakat dalam mengamalkan kode etik jurnalistik khususnya pasal 11
5.	Solmisah, 2017	Strategi Jurnalis Muslim Dalam Memegang Prinsip Kode Etik Jurnalistik (Studi	Sama sama menggunakan kualitatif deskriptif metodologi fenomenologi	Penelitian terdahulu meneliti sampel jurnalis muslim yang ada di Surabaya sedangkan penelitian saat ini hanya

